



MID/DWI APRIANI

PELAYANAN KTP-E DAN AKTA DI MAL: Petugas Disdukcapil Kota Palembang tengah memberikan pelayanan pembuatan KTP-E, akta kelahiran di Mal Palembang Trade Center (PTC), Palembang, Sumsel, kemarin. Selama tujuh hari kedepan, Disdukcapil melakukan pelayanan jemput bola di ruang publik seperti di pusat perbelanjaan.

LAYANAN PUBLIK

Layanan Puskesmas Berbasis Daring

SEBAGAI garda terdepan yang bertanggung jawab menanganai kesehatan warga, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sudah sepatutnya mendapat perhatian serius oleh pemangku kebijakan.

Hal tersebut semakin disadari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, yang kini memanfaatkan *big data* dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas yang ada di setiap desa. Saat ini seluruh puskesmas di Lamongan sudah terkoneksi dalam satu jaringan Sistem Informasi Kesehatan Lamongan elektronik (Sikla-E).

Aplikasi sistem ini telah diujicobakan, seperti yang disampaikan oleh Bupati Fadeli sesuai menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 di halaman Dinas Kesehatan Lamongan, kemarin.

Fadeli pun berharap, Sikla-E tersebut bisa menjadi jawaban

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Melalui program ini Bupati Fadeli secara khusus mengapresiasi seluruh insan kesehatan di Lamongan.

Karena dengan kerja keras dan profesional, mereka telah mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lamongan. Di sisi lain, Pemkab juga terus meningkatkan sarana dan prasarana layanan bidang kesehatan untuk warganya. Di antaranya, memperbanyak pengadaan mobil sehat, sepeda sehat, serta peningkatan kapasitas petugas kesehatan. "Ini semua untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.

Lewat Sikla-E ini, seluruh data riwayat medis pasien terkoneksi dalam satu jaringan sehingga pasien kini tidak diharuskan menunggu terlalu lama untuk urusan administrasi. "Karena alur pelayanannya lebih jelas, dan beban

administrasi petugas juga berkurang," jelasnya.

Dari sisi medis, dengan sudah mengantongi data riwayat kesehatan pasien dalam bentuk digital, pelayanan kesehatan semakin efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan Sikla-E bisa meminimalkan terjadinya kesalahan medis.

Sejumlah inovasi di bidang kesehatan dikatakan Fadeli juga telah mampu membawa citra baik nama Lamongan di tingkat nasional dan regional. Seperti Lenyapkan Pasung Memanusiakan Pasien Jiwa (Lesung Si Panji), Forum Aku Cinta Anak (FACA), serta penuntasan Lamongan menjadi Open Defecation Free (ODF).

Dia juga menegaskan perbaikan infrastruktur serta peningkatan SDM kini menjadi fokus pemerintahannya. "Apa yang sudah dilakukan seperti rehabilitasi dan pembangunan seluruh puskesmas, maupun rumah sakit milik pemerintah. (YK/N-1)

Hapus Data Kependudukan yang Invalid

Ada beberapa daerah yang jarang melakukan pemutakhiran database kependudukan karena khawatir akan berdampak pada jumlah kursi saat pemilu.

LINA HERLINA
lina@mediaindonesia.com

Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk tidak ragu menghapus data kependudukan yang tidak sesuai sebagai bentuk upaya pemutakhiran database kependudukan. Pertimbangan politis yang dikaitkan dengan jumlah kursi di legislatif hendaknya diabaikan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Kependudukan

Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk (Disdukcapil Dalduk) Provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondolele, kemarin, setelah melihat hasil pemutakhiran data kependudukan di daerahnya yang masih rendah. Pemutakhiran database kependudukan ini disebutnya untuk melihat prog-prog perekaman data.

"Bisa saja, mereka tidak melakukan pembersihan data kependudukan. Mungkin ada yang sudah pindah, meninggal.

Seharusnya ini dilakukan untuk meng-update data mereka," tuturnya. Menurut Sukarniaty, ada beberapa daerah yang jarang melakukan pemutakhiran database kependudukan karena khawatir akan berdampak pada jumlah kursi saat pemilu.

Dia mencontohkan yang terjadi di Toraja Utara. Kepala daerahnya protes karena kehilangan kursi setelah melakukan pemutakhiran data. "Saya harap ini menjadi perhatian dari teman-teman kabupaten dan kota, memang ada beberapa kendala terkait dengan pemutakhiran data tersebut," ujarnya.

Terkait dengan keberlangsungan pendataan penduduk, Pemkot Medan mengatakan butuh stok kartu KTP-E seba-

Pemutakhiran data kependudukan sangat dibutuhkan, tidak saja untuk kepentingan Pemilu 2019, lebih dari itu akan bermanfaat terhadap segala perencanaan pembangunan.

nyak 117 ribu lembar sampai dengan pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, OK Zulfi, mengungkapkan dalam beberapa pekan terakhir pihaknya mengalami kekosongan stok kartu KTP-E.

Kebutuhan KTP-E di Kota Medan saat ini sebanyak 100 ribu lembar tetapi yang sempat tersedia hanya 2.000 lembar sehingga hanya bertahan sehari. Terlebih, Pemkot memprediksi kebutuhan KTP-E sampai dengan Pemilu 2019 mencapai 117 ribu lembar. Terdiri dari 100 ribu lembar kebutuhan saat ini ditambah 17 ribu lembar untuk usia remaja yang sebelum Pemilu 2019 nanti

sudah berusia 17 tahun.

Verifikasi DPT

Perbaikan data pemilih yang berbasis KTP-E kini tengah dilakukan KPU di berbagai daerah. Pada hasil rapat pleno penyampaian hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap II, untuk Pemilu 2019. Tambahan warga yang masuk dalam DPTHP II itu, masing-masing untuk KPU Kota Pasuruan sebanyak 3.478 orang pemilih, sedangkan untuk KPU Kabupaten Pasuruan, bertambah sebanyak 15.972 pemilih.

"Setelah dilakukan perbaikan, bertambah 3.478 pemilih sehingga total DPT untuk Pemilu 2019 nanti sebanyak 145.737 pemilih," kata Ketua KPU Kota Pasuruan, Fuad Fathoni. (YP/RF/BB/AB/N-1)

Kematian Nelayan Aceh di Myanmar Janggal



MIA/AMRUDDIN ABDULLAH

DIAMANKAN OTORITAS MYANMAR: Nelayan tradisional mencari ikan di pesisir Selat Malaka, Kabupaten Pidie, Aceh, pekan lalu. Nelayan Aceh yang hilang kontak pada Selasa (6/11), ternyata ditangkap pihak otoritas Myanmar.

KABAR buruk meninggalnya seorang nelayan tradisional asal Idi, Kabupaten Aceh Timur, yang terdampar di perairan Kawthaung, Provinsi Tanintharyi, Myanmar, menjadi perhatian masyarakat luas di sana. Nurdin bin Nurman, 41, dikabarkan meninggal setelah mencebur ke laut

dalam upaya menyelamatkan diri bersama 15 rekannya setelah mereka dikejar-kejar pihak Angkatan Laut Myanmar pada Selasa (6/11).

Hingga kini 15 rekan Nurdin juga masih ditahan di Myanmar. Upaya untuk membebaskan mereka sebenarnya telah dilakukan Kedubes RI

di Myanmar. Namun, karena rumitnya birokrasi di sana, upaya itu belum membuahkan hasil.

Lambatnya upaya pembebasan tersebut membuat perwakilan nelayan di Idi mendesak agar pemerintah Indonesia dan pihak Myanmar dapat membentuk tim khusus guna melakukan investigasi terkait dengan kasus kematian Nurdin. Pihak Indonesia, menurut Adli Abdullah, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tidak boleh menerima begitu saja alasan pihak Myanmar.

Mantan Sekjen Panglima Laot Aceh itu mendesak pemerintah Myanmar agar terbuka terhadap penyebab kasus kematian nelayan kecil Aceh tersebut. Dia pun meminta Kemenlu RI dan Pemerintah Aceh tidak tinggal diam untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi saat di tengah laut hingga mereka menghindari kejaran pihak keamanan Myanmar.

"Tidak bisa semudah itu mereka mengatakan nelayan Aceh meninggal karena terjun

ke laut saat melihat pihak keamanan Myanmar. Perlu diketahui apakah benar demikian atau mengapa Nurdin sampai meninggal. Mungkin ada hal lain yang belum terungkap," tegas Adli.

Menurut Adli, kalau 16 nelayan Aceh itu melanggar teritorial, pemerintah Myanmar harus membuktikan secara hukum karena para nelayan kecil itu saat melaut menggunakan kapal kayu dan peralatan sangat sederhana. Jadi, hampir tidak mungkin bermaksud melanggar wilayah otoritas negara lain.

"Pihak keluarga korban dan warga Aceh lainnya sulit menerima kenyataan ini. Mereka ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi saat korban bersama 15 temannya ditangkap pihak keamanan Myanmar," pungkasnya. Hal lain yang dianggap janggal, yakni jenazah Nurdin konon diserahkan kepada Kepolisian Kawthoung oleh AL Myanmar dan selanjutnya langsung dimakamkan di negeri Aung San Suu Kyi itu. (Amiruddin A Reubeh/N-1)



ANTARA/RAHMAD

TERJARING RAZIA SYARIAT: Petugas Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah Islam) memakaikan kain sarung terhadap warga yang kedatangan memakai celana ketat saat razia hukum syariah Islam di Lhokseumawe, Aceh, kemarin. Razia gabungan Wilayatul Hisbah yang melibatkan aparat TNI/Polri menjaring puluhan warga yang memakai pakaian tidak sesuai dengan hukum syariah.

INDOKORDSA

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT INDO KORDSA TBK ("Perseroan")**

TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2018

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 12 November 2018, telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2018, sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada pemegang/pemilik saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 November 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

Jadwal	
Pengumuman di Bursa	14 November 2018
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 November 2018
Ex dividen di pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	21 November 2018
Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	23 November 2018
Cum Dividen di Pasar Tunai	23 November 2018
Ex dividen di Pasar Tunai	26 November 2018
Pembayaran Dividen Interim	30 November 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 November 2018.
- Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 30 November 2018. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon 650 5829/652 1010 Ext. 8230 paling lambat pada tanggal 23 November 2018 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP. Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah diligulasasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 23 November 2018 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud. Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai Februari 2019.
- Pengumuman terkait dengan pembagian Dividen Interim ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Citeureup – Bogor, 14 November 2018
Direksi Perseroan

Pengumuman Pelelangan

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ("PHE ONWJ"), beralamat di PHE Tower Lantai 3, Jl. TB Simatupang Kav. 99 Jakarta 12520, mengundang Calon Peserta Pengadaan untuk mengikuti Pelelangan.

Nomor Pengadaan : S32518336B
Judul Pengadaan : **Whipstock Services**

Golongan	Bidang/Sub Bidang	Batasan Minimum TKDN
Besar	- Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam; - Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi; atau - Memiliki pengalaman yang sesuai dengan lingkup kerja	35%

Nomor Pengadaan : S37418387A
Judul Pengadaan : **Technical Services for Instrument Maintenance and Repair**

Golongan	Bidang/Sub Bidang	Batasan Minimum TKDN
Besar	B.910 - Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam atau memiliki pengalaman sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan	55%

Calon Peserta Pengadaan dapat melihat persyaratan selengkapnya pada Papan Pengumuman atau website PHE sebagai berikut : <http://scm.phe.pertamina.com>

Tempat dan waktu Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tempat : Panitia Pengadaan PHE ONWJ
PHE Tower, Mezzanine Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 99 Jakarta 12520
Hari / Tanggal : Rabu - Senin / 14 November 2018 - 19 November 2018
Pukul : 07.30 WIB - 11.30 WIB

Tatacara Pelelangan ini menggunakan penilaian kualifikasi. Tata waktu dan seluruh Proses Pelelangan ini mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Wilayah Kerja Kontrak Bagi Hasil Gross Split No. 35/PHE/2017-20 Revisi 0

Jakarta, 14 November 2018
Panitia Pengadaan PHE ONWJ

GEO DIPA ENERGI

PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG
Nomor : 024.PL/PST.PBJ-GDE/XI/2018

No	Pekerjaan	No. RKS	Lokasi Kerja	Bidang/Sub Bidang
1	Sewa Peralatan Hydraulic Workover Unit Untuk Pekerjaan Workover Sumur - Sumur di Lapangan Panas Bumi Dieng	RKS-087.R-PST/GDE/XI/2018	Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah	Operasi / Kerja Ulang Sumur

PENDAFATARAN DAN PENGAMBILAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

Hari : Rabu - Kamis
Tanggal : 14 - 15 November 2018
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Aditawarman Kav.55 Jakarta Selatan
Waktu : 10.00 - 15.00 WIB (Tutup Istirahat: 12.00 - 13.00 WIB)

SYARAT PENDAFATARAN DAN PENGAMBILAN RKS

- Membawa surat kuasa bermaterai Rp.6.000 dari pimpinan perusahaan (jika diwakilkan) dan menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan menandatangani aslinya.
- Menyerah biaya penggantian dokumen sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai diserahkan ke bagian procurement kantor pusat.

PERSYARATAN CALON PESERTA PENGADAAN
Persyaratan Calon Peserta Pengadaan selengkapnya dapat dilihat di www.geodipa.co.id bagian Procurement.

PERTANYAAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT
Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengetahui informasi lebih lanjut dapat berkorespondensi melalui email: procurement@geodipa.co.id

Jakarta, 14 November 2018
Panitia Pengadaan
PT Geo Dipa Energi (Persero)